

MENYONGSONG SEABAD NU: MEMBACA PEMIKIRAN KEAGAMAAN DAN PEREKONOMIAN

Nahdlatul Ulama di usia seabad di tahun 2026 kelak adalah suatu pencapaian penting atas kontribusi yang telah diberikan kepada umat, bangsa dan negara. Usia yang tidak muda lagi di tengah gelombang perubahan sosial, budaya dan politik bangsa dan dunia global. Tak heran jika mengimajinasikan NU di usia seabad tidaklah semudah membalikkan telapak tangan; butuh refleksi historis, pemikiran, dan skenario ke depan.

Pada dasarnya, jejak-jejak langkah yang sudah digariskan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari pada 1926 merupakan pijakan awal dalam membangun skenario seabad NU. Tidak lain, agar NU tidak kehilangan akar historisnya meskipun arus modernisasi begitu kuat menghantam eksistensi organisasi, tradisi dan paham yang dianutnya. Itulah sebabnya, Nahdlatul Wathon (1916) muncul sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan, Nahdlatul Tujjar (1918) sebagai lambang gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Tashwirul Afkar (1918) sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan. Tiga pilar ini merupakan cikal bakal berdirinya NU. Kombinasi antara pendidikan, politik, ekonomi, keilmuan dan kebudayaan dalam sejarah awal NU

merupakan kontribusi jelas NU pada umat dan bangsa.

Sembilan dekade lebih NU berkiprah hingga sekarang setidaknya mencerminkan apa yang telah diperbuat oleh NU. Refleksi historis jejak-jejak NU telah banyak memberi inspirasi dalam menatap NU ke depan dalam mendisain kontribusi terhadap umat dan bangsa Indonesia. Jika NU gagal melihat masa lalu dan menatap masa depan, maka NU akan kehilangan elan vitalnya dalam menyongsong seabad NU di tahun 2026.

Di sinilah *scenario building* yang biasa disebut pula *scenario planning* atau *scenario development* diperlukan sebagai narasi yang menggambarkan "kemungkinan jalan menuju masa depan". Skenario menggambarkan secara tajam kemungkinan masa depan, di mana ditampilkan beragam kemungkinan yang didapat dari hipotesa-hipotesa yang masuk akal. *Scenario building* merupakan piranti untuk merangsang berbagai pemikiran tentang berbagai kemungkinan di masa depan dengan berfokus pada kekuatan-kekuatan signifikan yang bermakna.

Berikut ini percikan pemikiran dalam membaca seabad NU (2026) di tengah berbagai perubahan yang kini terjadi dan di masa yang akan datang.

DINAMIKA PEMIKIRAN KEAGAMAAN NU

RUMADI

Direktur The Wahid Institute

Pertanyaan yang bisa dikemukakan untuk mengawali tulisan ini adalah, bagaimana kira-kira wajah pemikiran keagamaan NU menjelang umurnya yang seabad? Pertanyaan ini tentu tidak mudah dijawab, bukan saja karena satu abad NU masih sekitar 16 tahun lagi yang berarti masih ada tiga kali muktamar sehingga segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi juga memetakan perkembangan pemikiran keagamaan NU sekarang ini bukan pekerjaan mudah. Mengapa?

Karena melihat NU tidak cukup dengan melihat dokumen-dokumen resmi sebagai produk organisasi. Tapi juga harus melihat kecenderungan tokoh-tokohnya. Bahkan, perkembangan pemikiran keagamaan dalam struktur NU terkadang tidak selalu selaras dengan perkembangan di luar struktur.

Sebagaimana dimaklumi, NU sering diidentifikasi sebagai organisasi yang memang didedikasikan untuk merawat tradisi lama yang baik (*al-qadimish shalih*) yang dirumuskan dalam ajaran *Ahlus-sunnah wal Jama'ah*. Kesetiaan NU pada tradisi inilah yang menjadi ruh gerakannya, sehingga NU tidak begitu silau dengan berbagai perubahan dan perkembangan. Terkadang NU begitu akomodatif dengan perubahan, tapi pada saat yang lain, NU bisa menjadi organisasi yang sangat radikal. Hal inilah yang menjadikan NU sulit diidentifikasi



dengan satu kategori. Para peneliti asing maupun pribumi yang gegabah sering tidak memahami hal ini sehingga sering terkecoh.

Nalar keagamaan NU adalah nalar fiqih. Hampir seluruh gerak gerik intelektualisme NU selalu berada dalam jalur ini. Bahkan, *saking* dominannya, nalar fiqih ini menjadi pertimbangan utama ketika NU memutuskan masalah-masalah penting, termasuk dalam hal politik. Meskipun dalam ajaran NU terdapat aspek yang lain seperti teologi dan tasawuf, namun dimensi fiqih inilah yang paling dominan dan paling berkembang. Ajaran teologi dan tasawuf tampaknya tidak terlalu berkembang di lingkungan NU, dalam arti kurang-adanya pembaruan-pembaruan. Teologi dan tasawuf di NU lebih banyak dihayati dan diamalkan

daripada dipikirkan.

Dengan kesetiaan pada tradisi itu, dalam bidang fiqh misalnya, NU memegang teguh prinsip bermadzhab. Dalam kaitan ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai konsekuensi prinsip bermadzhab.

Pertama, NU menyandarkan seluruh pemikiran hukum sepenuhnya pada empat imam madzhab fiqh (Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal), baik secara *qauli* maupun *manhaji*. Hal ini bisa dilihat dari dokumen-dokumen bahtsul masail baik yang dilakukan oleh NU sebagai organisasi maupun yang dilakukan jaringan pondok-pondok pesantren yang berafiliasi kultural pada NU. Karena itu, sejauh apapun pemikiran keagamaan NU, terutama mengenai hukum Islam, akan tetap dalam koridor madzhab.

Kedua, dengan bersandar pada imam mazhab ini merupakan cara yang ditempuh NU untuk menjaga otentisitas keberagamaannya. Mengapa tidak mengembalikannya otentisitas itu pada Al-Qur'an dan hadis? Dalam pandangan NU, yang bisa langsung menggali hukum dari dua sumber pokok tersebut hanya orang yang mempunyai kategori *mujtahid mutlaq* atau *mujtahid mustaqil*. Kata *mujtahid* di lingkungan NU sangat dihindari, dan orang NU lebih bangga menyebut dirinya sebagai *muqallid*. Karena itu, dalam waktu yang cukup lama bahtsul masail NU tidak pernah mengutip ayat Al-Quran dan hadis secara langsung.

Menjelang Muktamar ke-32 di Makassar hal ini kembali menjadi bahan perbincangan terutama menyangkut for-

mat jawaban bahtsul masail, apakah perlu mencantumkan ayat al-Quran atau tidak? Jawaban sementara yang muncul, boleh saja bahtsul masail mengutip ayat Al-Quran atau hadis tapi harus tetap dalam koridor bermadzhab. Artinya, pengutipan sebuah ayat dilakukan untuk menjawab sebuah masalah sebagaimana para ulama terdahulu mengutipnya.

Ketiga, sekilas cara berpikir tersebut menjadikan NU beku dan jumud. Namun dalam kenyataannya tidak demikian. Modal tradisi tersebut ternyata bisa menjadi basis transformasi, dengan terus melakukan revitalisasi. Hal inilah yang terkadang bisa memecah para pengamat yang tidak jeli melihat NU. Salah satu perkembangan penting yang bisa dilihat sebagai perkembangan itu adalah adanya tiga bidang bahtsul masail, yaitu *waqi'iyah*, *maudhu'iyah* dan *qanuniyah*. Pada mulanya fiqh NU identik dengan *waqi'iyah* yang sekedar menjawab masalah-masalah keseharian dengan mencari rujukan *'ibarah-ibarah* dari kitab yang dianggap *mu'tabar* yang biasanya berujung pada hukum haram-halal, boleh-tidak boleh dan seterusnya.

Sejak tahun 90-an mulai diperkenalkan terminologi bahtsul masail *maudhu'iyah*, yang hasilnya yang tidak selalu berujung hukum halal-haram, tapi bisa pada masalah *dhawabith*, metodologi, masalah sosial dan sebagainya. Bahkan dalam perkembangannya ada tema-tema yang terkait dengan hukum positif dan respon NU terhadap pembuatan regulasi. Dengan pengembangan tersebut, fiqh NU menjadi lebih berkembang dan tidak selalu berujung pada hukum halal-haram. Tapi bisa juga berupa analisis-analisis sosial

dengan menggunakan perangkat dan pisau analisis ilmu sosial, dan juga politik.

Perkembangan tersebut dimungkinkan terjadi di NU antara lain karena semakin terdiversifikasinya pendidikan warga NU, tidak hanya berhenti di jalur pesantren, tapi juga ke perguruan-perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, Barat maupun Timur Tengah. Akibat dari perkembangan tersebut, bukan saja semakin banyak anak-anak NU yang berpendidikan tinggi, tapi juga semakin beragamnya aliran-aliran dan kecenderungan pemikiran keagamaan NU.

Mengelola Keragaman NU

Pertanyaannya, bagaimana mengelola berbagai keragaman kecenderungan tersebut? Ini bukan pertanyaan yang mudah dijawab, tapi hal yang pasti kelembagaan NU harus dipersiapkan untuk menghadapi kenyataan baru ini. Jika salah kelola, kekayaan intelektual warga NU tidak menjadi kekuatan, tapi justru akan menjadi titik lemah. Jika dalam waktu yang lama titik lemah NU dalam bidang politik karena sulitnya mengelola *interest* politik warga dan elit NU, bukan tidak mungkin ke depan diversifikasi intelektual NU ini juga menjadi titik lemah baru. Bukan karena tidak adanya cerdas pandai di lingkungan NU, tapi karena kegagalan-kegagalan mengelola. Selama lima tahun terakhir gejala demikian sangat bisa dirasakan.

Satu hal yang tidak mungkin dihindari dari keragaman pemikiran tersebut adalah munculnya tarik menarik dan ketegangan-ketegangan. Kalau hal tersebut masih dalam batas dinamika pemikiran, masih bisa ditoleransi. Tapi

kalau sudah sampai pada tahap saling 'menyisihkan', inilah yang justru membahayakan NU sendiri.

Melihat kenyataan tersebut, masa depan intelektualisme NU, di samping akan menampakkan wajah yang semakin dinamis, namun juga akan diwarnai dengan desakan yang semakin kuat dari pemegang struktur NU. Meskipun pemegang struktur NU tidak secara langsung melakukan kontrol atas pemikiran yang berkembang, namun kiai-kiai yang selama ini dikenal berada dalam kubu konservatif akan selalu mengawasi orang-orang yang dianggap membahayakan. Bila hal ini terjadi, maka para pengusung pikiran-pikiran keislaman progresif akan semakin menghadapi banyak kendala terutama dari pemegang struktur NU dan para kiai. Meski demikian, hal ini tidak akan sepenuhnya bisa mematikan gerakan progresif. Di samping karena sebaran yang sudah semakin merata di berbagai kantong NU, anak-anak muda NU yang menempuh jenjang pendidikan tinggi juga semakin banyak.

Hal lain yang sering muncul terkait dengan perkembangan pemikiran keagamaan NU adalah persoalan *fikrah nahdliyah* yang sering digunakan sebagai 'batas' guna menjelaskan mana yang NU dan mana yang bukan NU. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah perkembangan pemikiran anak-anak NU masih bisa disebut dalam koridor *fikrah nahdliyyah*, ataukah sudah berada di luar itu? Apakah mereka masih bisa disebut NU atau tidak?

Pertanyaan-pertanyaan di atas terkait dengan sejauh mana kelenturan ideologi Aswaja NU dan *fikrah nahdliyah* menerima berbagai arus pemikiran. Pertanyaan

tersebut penting untuk menjadi bahan diskusi mengingat banyak kalangan menganggap bahwa pikiran-pikiran yang dikembangkan sebagian kalangan NU muda sudah keluar dari *fikrah nahdliyah*. Karena itu, mereka sulit dikatakan sebagai bagian dari gerakan pemikiran NU.

Untuk menjawab masalah ini pertama-tama harus dijawab, apa sebenarnya yang menentukan identitas ke-NU-an itu? Menurut penulis, identitas ke-NU-an pertama-tama ditentukan oleh kultur, bukan soal aliran pemikiran yang distrukturkan. Hal ini bisa ditelusuri dari awal sejarah berdirinya NU. Sebelum didirikan pada 1926, NU pada awalnya adalah jama'ah, yaitu sekumpulan orang dan komunitas yang memiliki dan menjalankan kultur keagamaan tertentu. Baru kemudian kultur tersebut distrukturkan menjadi jam'iyah, organisasi. Proses strukturisasi bukan hanya menyangkut penataan kelembagaan, tapi juga mbingkai praktik-praktik kultural tersebut dalam rumusan-rumusan paham keagamaan. Hal itu berarti, identitas kultur dan perasaan menjadi bagian dari NU merupakan hal terdalam dari identitas ke-NU-an itu sendiri.

Proses strukturisasi kultural demikian, selalu membawa dampak ganda. Di satu sisi akan terjadi proses penguatan karena organ kultural yang berserakan bisa diorganisir menjadi sosok kuat sehingga kultur akan tetap bertahan. Namun di sisi lain, bisa juga terjadi ketegangan karena struktur sering kali merasa berkuasa untuk mengatur kultur. Rumusan-rumusan paham keagamaan dalam struktur juga sering dianggap sebagai rumusan yang final dan selesai. Akibatnya, rumusan

paham keagamaan itu digunakan untuk mengukur apakah seseorang masih dalam bingkai paham keagamaan yang diakui atau tidak.

Menstrukturkan paham keagamaan melalui lembaga seringkali menjadikan NU sulit untuk melakukan akselerasi. Doktrin juga menjadi kurang lentur dalam menghadapi perubahan. NU bisa menjadi baju yang sempit, terutama jika pengendali NU mempunyai wawasan keagamaan yang sempit. Belakangan proses penyempitan ini begitu terasa, terutama ketika NU diperhadapkan dengan derasnya arus informasi ilmu pengetahuan yang memaksa NU untuk mendialogkan, bahkan meninjau ulang sejumlah doktrin keagamaannya. Mengerasnya sikap elit NU, baik pengurus formal maupun non formal, terhadap gerakan beberapa anak muda NU antara lain bisa dilihat dari perspektif ini, yaitu keterbatasan doktrin untuk menampung perkembangan.

Berdasar uraian di atas, penulis ingin menegaskan bahwa secara kultural identitas ke-NU-an tidak bisa dieliminasi, meski dengan kekuatan struktural NU, sejauh orang tersebut masih merasa sebagai bagian dari NU. Demikian juga dengan keliaran pemikiran keagamaan tidak bisa merusak identitas ke-NU-an, meski produk pemikirannya tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai produk NU. Identitas ke-NU-an hanya bisa gugur jika orang tersebut sudah tidak lagi merasa menjadi bagian dari NU. Karena itu, identitas ke-NU-an sebenarnya ditentukan oleh kesetiaan kulturalnya.

Meski demikian, memang harus diakui, tidak mudah untuk mengelola hal tersebut. Namun, hal yang penting untuk

diperhatikan adalah setajam apapun perbedaan itu tidak dijadikan alat untuk mendelegitimasi identitas ke-NU-an melalui ukuran-ukuran prosedur organisasi. Karena itu, pengurus struktur NU tidak perlu menjadi 'polisi' untuk menelisik isi pikiran seseorang apakah seseorang masih bisa di sebut NU atau tidak.

Sampai di sini penulis akan memasuki pembahasan pertanyaan kedua, menyangkut konfigurasi ke depan intelektualisme NU. Di tengah polarisasi yang cukup tajam dan desakan yang begitu kuat terhadap gerakan intelektualisme anak muda NU, terutama yang bergerak di luar struktur resmi, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi.

Pertama, polarisasi akan terus berlangsung dan kelompok kritis ini akan selalu berada di lapisan pinggiran NU. Kemungkinan ini bisa saja terjadi bila arus gerakan Islam di Indonesia semakin didominasi arus fundamentalis-konservatif dan struktur NU juga dikuasai oleh kelompok yang berada dalam arus ini.

Kedua, arus pemikiran kelompok muda NU akan mendominasi perkembangan NU. Kemungkinan ini bisa terjadi kalau anak-anak muda NU progresif menjadi pengendali struktur NU dengan dukungan penuh dari kiai-kiai. Namun kemungkinan ini agaknya kecil kemungkinan terjadi jika melihat konstelasi perkembangan gerakan Islam sekarang. Di samping itu, anak muda NU yang mewakili sayap progresif juga wajahnya tidak tunggal. Karena itu, meskipun sejumlah anak muda NU masuk menjadi pengurus struktur NU tidak mudah bagi mereka untuk melaksanakan gagasan-gagasannya melalui struktur NU.

Ketiga, akan terjadi konvergensi-

konvergensi yang memungkinkan masing-masing untuk tetap bertahan hidup dan bersinergi. Kemungkinan ini sebenarnya lebih mempunyai peluang terjadi. NU sebagai organisasi besar tentu tidak bisa mengabaikan potensi kader-kader mudanya, karena mereka adalah investasi NU di masa depan. Konvergensi itu bisa terjadi pada tingkat gagasan keagamaan dan pada tingkat personal. Konvergensi pada tingkat gagasan ditandai bila gagasan dan agenda pemikiran kelompok progresif bisa mewarnai gerakan NU. Sedangkan konvergensi personal ditandai dengan adanya akomodasi personal dalam struktur NU.

Konvergensi tersebut sebenarnya lebih ditentukan oleh bagaimana kalangan muda bisa berkomunikasi dengan berbagai kelompok dan aliran dalam NU. Dalam kultur NU, seradikal apapun pemikiran seseorang, kalau dia bisa menjalin komunikasi kultural dengan tokoh-tokoh NU, baik tokoh formal maupun non-formal, maka akomodasi akan mudah dilakukan. Oleh karena itu, komunikasi kultural merupakan kata kunci untuk menyelesaikan berbagai polarisasi yang ada dalam NU.

Menjelang usia NU seabad, konstelasi dan peta gerakan pemikiran keagamaan NU agaknya tidak akan jauh dari masalah tersebut. Hal penting yang perlu menjadi renungan bersama adalah bagaimana menjadikan NU sebagai rumah bersama.

Rumah di mana semua orang bisa bersenda gurau meski untuk menyelesaikan masalah yang sangat serius.